

Serupa Tapi Tidak Bersama : Pemberitaan Media Dalam Konflik Pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal di Kota Bogor

Yusuf Afandi^{1*}, Awis Karni², Andri Ashadi³

¹UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,

²³UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

yusufafandi@uinbukittinggi.ac.id,

andriashadi@uinib.ac.id

ABSTRACT

This article aims to analyze the framing of media coverage related to the conflict over establishing the Imam Ahmad Bin Hanbal Mosque in Bogor City. This conflict attracted public attention because it involved various parties, including the local community, government, and religious organizations. The framing analysis method used in this research is Robert Entman's model, which includes four elements: problem definition, problem cause, moral judgment, and problem-solving. Data was obtained from the national media Republika.id, which was selected based on the intensity of coverage and diversity of perspectives. The analysis results show that the media have certain framing tendencies influenced by their respective agendas and ideologies. Detiknews and barometernews.id highlights social and religious tensions, while others emphasize legal aspects and government policies. In addition, this article found that media framing played an important role in shaping public opinion and people's perceptions of the conflict. The study concludes that a deeper understanding of media framing analysis can help people criticize the information they receive and develop more objective thinking. The article also provides recommendations for the media to be more balanced and accurate in reporting sensitive religious and social diversity issues.

Keywords: Framing analysis, media, mosque establishment conflict, Imam Ahmad Bin Hanbal Mosque, Bogor City

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan media terkait konflik pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal di Kota Bogor. Konflik ini menarik perhatian publik karena melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi keagamaan. Metode analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Robert Entman yang mencakup empat elemen: pendefinisian masalah, penyebab masalah, penilaian moral, dan penyelesaian masalah. Data diperoleh dari media nasional Republika.id yang dipilih berdasarkan intensitas pemberitaan dan keberagaman perspektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa media memiliki kecenderungan framing tertentu yang dipengaruhi oleh agenda dan ideologi masing-masing. Detiknews dan barometernews.id cenderung menyoroti aspek ketegangan sosial dan agama, sementara yang lain lebih menekankan pada

Serupa Tapi Tidak Bersama : Pemberitaan Media Dalam Konflik Pendirian Masjid

278

Imam Ahmad Bin Hanbal di Kota Bogor

Yusuf Afandi, Awis Karni, Andri Ashadi

aspek hukum dan kebijakan pemerintah. Selain itu, artikel ini menemukan bahwa framing media berperan penting dalam membentuk opini publik dan persepsi masyarakat terhadap konflik ini. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih dalam mengenai analisis framing media dapat membantu masyarakat dalam mengkritisi informasi yang diterima dan mengembangkan pemikiran yang lebih objektif. Artikel ini juga memberikan rekomendasi bagi media untuk lebih berimbang dan akurat dalam memberitakan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan keberagaman agama dan sosial.

Kata kunci : Analisis framing, media, konflik pendirian masjid, Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, Kota Bogor

PENDAHULUAN

Toleransi masih menjadi salah satu permasalahan beragama yang masih menjadi masalah besar bagi kerukunan umat beragama di Indonesia (Wijaksono, 2023). Masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku bangsa yang beragam, bermacam agama-agama yang diakui oleh Negara, serta aliran kepercayaan yang masih menjadi perdebatan dan termarginalkan dalam kehidupan sosial keagamaan di tengah masyarakat (Khaidar & Nugraha, 2022). Keberagaman ini telah menjadi permasalahan bagi keharmonisan dan kesatuan masyarakat Indonesia, bahkan berujung pada tindak konflik fisik yang mampu memecah belah kesatuan bangsa (Harahap, 2018; Noorbani, 2023).

Konflik Fisik keagamaan di Indonesia telah terjadi berulang kali di Indonesia. Konflik fisik keagamaan yang pernah terjadi Pekalongan (1995), Situbondo (1996), Poso (1998), Ambon (1999), Tasikmalaya (1996), Sukabumi (2008), dan beberapa kekerasan lainnya di beberapa wilayah Indonesia (Rasidin et al., 2023) , dan beberapa konflik keagamaan ini juga berlangsung hingga saat ini, walaupun intensitasnya sudah mulai berkurang. Salah satu puncaknya adalah konflik antara Islam dan Kristen pada tahun 1999 yang menewaskan lebih dari 10 ribu orang di Maluku yang menarik (Al Qurtuby, 2016). Konflik keagamaan ini tidak hanya terbatas dengan konflik antar agama, akan tetapi konflik satu agama akibat adanya perbedaan aliran dalam keagamaan ini (Regus, 2020). Perbedaan pemahaman dalam memahami teks-teks keagamaan hingga melahirkan aliran-aliran keagamaan, meruncing menjadi beberapa permasalahan seperti penolakan terhadap pengajian yang dilaksanakan seperti penolakan dakwah Ustad Abdul Somad di 7 (tujuh) daerah di pulau Jawa (Detik.com, 2022), penolakan

dakwah Felix Siaw di daerah Semarang (Rahmat Wibisono, 2017), penolakan Dakwah Ustad Hannan Attaki di beberapa wilayah Jawa Timur (Rinanda, 2023), penolakan dakwah Ustad Riza Basalamah (Esti Widiyana, 2024), penolakan dakwah Ustad Khalid Basalamah (TVOne, 2023) dan beberapa dai populer lainnya ditolak oleh suatu komunitas, karena perbedaan dalam memahami konsep-konsep keagamaan.

Selain penolakan terhadap kegiatan ceramah, beberapa tindakan penolakan juga terjadi kepada aliran keagamaan yang minoritas seperti penolakan pendirian sekolah Muhammadiyah di Tuban (Muhammadiyah, 2022), penolakan pembangunan musala di wilayah Trenggalek (Jazai, 2024), dan penolakan pembangunan masjid di beberapa daerah di Indonesia. Penolakan ini bahkan berujung kepada tindakan fisik yang menimbulkan keributan dan konflik di tengah masyarakat. Salah satu pemberitaan yang menarik perhatian masyarakat pada tahun 2022 adalah penolakan pendirian Masjid Ahmad bin Hanbal oleh masyarakat kota Bogor karena dianggap mengganggu ketenteraman masyarakat dalam beragama di kota Bogor (Indonesia, 2022). Problema pendirian masjid oleh Yayasan Imam Ahmad bin Hanbal masih berlangsung hingga September 2024 (Utama, 2024). Keadaan problematik ini, sangat menarik untuk dikaji dari berbagai sisi, salah satunya dari sisi kajian analisis teks media, khususnya kajian analisis framing.

Penelitian mengenai konflik sosial dan keagamaan di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan dinamika yang beragam. Al Qurtuby (2016) menyoroti peran agama dalam kekerasan dan upaya rekonsiliasi di Maluku, memperlihatkan bagaimana faktor agama dapat digunakan baik untuk memperburuk maupun menyelesaikan konflik (Al Qurtuby, 2016). Hanumbhawono et al. (2024) lebih lanjut menyoroti potensi eksploitasi agama dalam konflik di Indonesia, menunjukkan bahwa konflik keagamaan sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan kekuasaan (Hanumbhawono et al., 2024). Sementara itu, Ariyanto (2023) menggunakan perspektif sosiologi agama untuk memahami konflik sosial antar kelompok agama, dengan menyoroti faktor-faktor sosial yang mempengaruhi konflik tersebut (Komang Ariyanto, 2023). Mukhtar dan Triana (2023) menyajikan perspektif Al-Qur'an tentang resolusi konflik sosial-keagamaan, mengusulkan budaya kebersamaan dan rembulan sebagai

pendekatan penyelesaian (Mukhtar & Triana, 2023). Panggabean dan Ali-Fauzi (2015) menekankan pentingnya peran aparat keamanan dalam mengelola konflik keagamaan, mengusulkan pendekatan yang lebih proaktif dan preventif (Panggabean & Ali-Fauzi, 2015). Rasidin et al. (2023) mengkaji dimensi agama dalam konflik politik dan kekerasan, menunjukkan bagaimana agama sering kali menjadi alat dalam konflik kekuasaan (Rasidin et al., 2023). Regus (2020) mengidentifikasi asumsi, penyebab, dan implikasi konflik antaragama di Indonesia pasca-otoritarianisme (Regus, 2020), sementara Ridho et al. (2023) menekankan pentingnya komunikasi antara pemangku kepentingan untuk menjaga kerukunan agama (Ridho et al., 2023). Rusmulyadi et al. (2021) melakukan analisis bibliometrik tentang penelitian konflik agama di Indonesia, memberikan gambaran umum tentang tren penelitian di bidang ini (Rusmulyadi et al., 2021). Setiawan et al. (2023) mengangkat tema toleransi beragama di Indonesia, menunjukkan bahwa ruang toleransi semakin meningkat meskipun tantangan masih ada (Setiawan et al., 2023). Secara keseluruhan, literatur ini menunjukkan bahwa konflik agama di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk politik, sosial, dan kebijakan, dan membutuhkan pendekatan yang holistik untuk resolusinya.

Kajian tentang konflik antar agama ini telah banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya dari berbagai perspektif kajian ilmu pengetahuan. Dan untuk kajian konflik antar aliran agama dalam satu agama belum terlalu banyak dikaji oleh para peneliti salah satunya tentang kajian analisis framing pemberitaan konflik pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal kota Bogor yang kontroversial pada tahun 2017 dan masih berlarut-larut hingga saat ini. Berita yang di analisis adalah berita yang dipublikasikan oleh Republika.co.id sejak tahun 2017-2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing untuk mengkaji bagaimana media Republika.co.id memberitakan konflik penolakan pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Kota Bogor oleh Komunitas Salafi pada tahun 2019-2022. Metode analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing Robert Entman yang terdiri dari empat elemen utama : pendefinisian masalah (*problem definition*), penyebab permasalahan (*causal interpretation*), evaluasi moral (*moral evaluation*), dan solusi yang

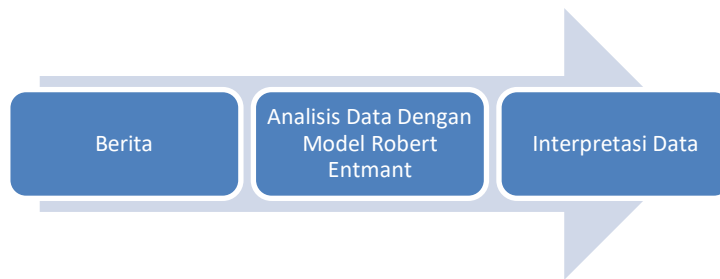
disarankan (*treatment recommendation*). Konsep analisis framing Robert Entman ini dapat dilihat pada tabel 1.

Pendefinisian masalah (<i>problem definition</i>)	Melihat bagaimana suatu peristiwa itu dilihat?
Penyebab masalah (<i>causal interpretation</i>),	Melihat bagaimana penyebab masalah itu terjadi?
Penilaian moral (<i>moral evaluation</i>),	Bagaimana penyelesaian yang ditawarkan?
Solusi yang disarankan (<i>treatment recommendation</i>).	Nilai Moral apa yang disajikan?

Tabel 1 Model Analisis Framing Robert Entman.

Data dikumpulkan dengan mengakses arsip berita yang dipublikasikan oleh Republika.co.id tentang konflik pendirian Masjid oleh Yayasan Imam Ahmad Bin Hanbal sejak tahun 2017. Pemilihan media Republika.co.id karena dianggap sebagai media yang konsisten menyuarakan kebangsaan, kerakyatan dan ke-Islaman (Republika, 2024). Sejak tahun 2017-2024, Republika.co.id telah memberitakan tiga berita terkait konflik pendirian masjid Ahmad bin Hanbal yang didirikan oleh Yayasan Ahmad bin Hanbal. Tiga berita tersebut tersebut dipublikasikan pada tanggal 29 Agustus 2017, 27 Juli 2017 dan 29 Juli 2022.

Data yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian peneliti melakukan analisis data dengan mengidentifikasi tiga berita tersebut dengan teknik analisis framing Robert Entman yang memiliki empat elemen. Selanjutnya peneliti menganalisis berita tersebut, bagaimana penekanan isu yang dibuat oleh Republika.co.id, kemudian data tersebut diinterpretasi melalui beberapa kajian atau teori yang relevan. Penjelasan tentang analisis data ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Analisis Data

Berbagai teknik yang dilakukan oleh peneliti ini, bertujuan untuk memastikan seluruh data yang didapatkan dan dianalisis menjadi valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pemberitaan media terhadap permasalahan yang sensitif, khususnya tentang permasalahan konflik perbedaan agama dan aliran keagamaan serta berbagai efek yang ditimbulkan terkait perbedaan tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji analisis framing pemberitaan konflik penolakan pendirian masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Kota Bogor Oleh Komunitas Salafi yang terjadi pada tahun 2017. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memahami bagaimana pemberitaan media terhadap konflik antar aliran agama Islam di Indonesia, karena konten yang disajikan sangat sensitif dan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan mampu menjadi potensi konflik bagi masyarakat. Pada artikel ini, peneliti menerapkan Analisis Framing Robert Entman untuk merumuskan konsep pemberitaan, sehingga berita-berita berkaitan dengan konflik keagamaan, tidak hanya antar agama akan tetapi juga aliran keagamaan dalam satu Agama. Analisa Framing Robert Entman akan melihat penekanan Isu yang ditampilkan melalui berita yang terkait dengan konflik pendirian Masjid Ahmad bin Hanbal di Kota Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Republika.co.id dalam Pemberitaan Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Republika merupakan salah satu media massa populer yang berlokasi di Indonesia. Republika.co.id pertamakali menyajikan berita pada tanggal 17 Agustus 1995, dua tahun setelah media cetaknya disebarluaskan. Media Republika.co.id dipimpin oleh Elba Damhuri. Artikel ini menganalisis pemberitaan terkait konflik pendirian rumah ibadah, dengan fokus pada Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor, yang dilaporkan oleh media Republika. Dalam konteks ini, konflik pendirian rumah ibadah mencerminkan ketegangan antara pihak pemerintah, masyarakat setempat, dan komunitas keagamaan terkait izin mendirikan bangunan (IMB). Melalui analisis tiga berita utama dari Republika, ditemukan beberapa pola utama dalam pemberitaan yang mengangkat dinamika antara kebijakan pemerintah, respon masyarakat, dan peran aktor-aktor lainnya. Pada artikel ini, peneliti menemukan tiga berita yang dipublikasikan oleh Republika.co.id tentang penolakan pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal oleh masyarakat setempat yang dikawatirkan dapat menimbulkan perpecahan masyarakat Kota Bogor. Artikel berita ini dapat dilihat pada Tabel 2.

No	Judul	Tanggal	Link Berita
1	Bima Arya akan Bekukan IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal	29 Aug 2017	https://internasional.republika.co.id/berita/ovfuhk/bima-arya-akan-bekukan-imb-masjid-imam-ahmad-bin-hanbal
2	Forkopimda Ikhtiarkan Islah Antara Warga dan Jamaah MIAH Bogor	27 Juli 2022	https://rejabar.republika.co.id/berita/rfo914396/forkopimda-ikhtiarkan-islah-antara-warga-dan-jamaah-miah-bogor
3	Yayasan Ahmad bin Hambal Tunggu Bima Arya Cabut Pembekuan IMB	29 Jul 2022	https://news.republika.co.id/berita/rfr8ks484/yayasan-ahmad-bin-hambal-tunggu-bima-arya-cabut-pembekuan-imb#google_vignette

Tabel 2. Berita Konflik Pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal di Kota Bogor

Berita Pertama berjudul Bima Arya akan Bekukan IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang dipublikasikan pada tanggal 29 Agustus 2017. Berita itu ditulis oleh Gumanti Awaliyah yang menarasikan bahwa Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan peninjauan kembali terhadap proses perizinan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang telah diberikan pada September 2016, karena adanya penolakan warga setempat terhadap pembangunan Masjid ini. Salah satu aspek peninjauan yang mesti disepakati oleh Yayasan Imam Ahmad bin Hanbal adalah masjid mesti bersifat inklusif dan terbuka untuk umum bagi masyarakat. Peninjauan ini juga merupakan salah satu upaya Walikota Bogor untuk meredam potensi konflik sosial yang akan terjadi di tengah masyarakat akibat perbedaan pemahaman keagamaan masyarakat.

Berita Kedua berjudul Forkopimda Ikhtiarkan Islah Antara Warga dan Jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor yang dipublikasikan pada tanggal 22 Juli 2022. Berita itu ditulis oleh Shabrina Zakaria yang menarasikan bahwa Forkopimda Kota Bogor menggelar rapat untuk membahas konflik sosial akibat pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Kecamatan Bogor Utara. Meskipun ada keputusan hukum dari PTUN yang mendukung pembangunan masjid, resistensi masyarakat tetap besar. Untuk menghindari konflik sosial dan fisik, Forkopimda, bersama DPRD Kota Bogor, berupaya mengadakan islah melalui musyawarah. Mereka mengambil langkah-langkah terukur berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012 untuk menjaga perdamaian selama 90 hari ke depan, sambil mencari solusi damai bagi kedua belah pihak

Berita ketiga berjudul Yayasan Ahmad bin Hambal Tunggu Bima Arya Cabut Pembekuan IMB yang dipublikasikan pada tanggal 29 Juli 2022 oleh Shabrina Zakaria. Berita tersebut menarasikan bahwa Yayasan Imam Ahmad bin Hambal menunggu Wali Kota Bogor, Bima Arya, mencabut pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Pembekuan ini dilakukan Bima Arya pada 2021 terkait protes warga setempat, meskipun ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan yayasan. Yayasan berharap Bima Arya segera memenuhi janjinya untuk mencabut pembekuan IMB,

sehingga pembangunan masjid bisa dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku. Hingga kini, dialog dengan pemerintah kota masih berlanjut untuk mencapai kesepakatan.

Ketiga berita tersebut menggambarkan perjalanan konflik terkait pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor. Pada 2017, Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor, meninjau kembali izin pembangunan masjid yang telah diterbitkan pada 2016. Hal ini dipicu oleh penolakan warga yang mengkhawatirkan eksklusivitas masjid. Walikota Bima Arya menyarankan agar masjid lebih inklusif untuk menghindari konflik sosial. Lima tahun kemudian, pada 2022, Forkopimda Bogor berupaya meredam ketegangan antara warga dan pihak masjid, meskipun PTUN telah mendukung pembangunan. Seluruh pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui dialog untuk menjaga perdamaian. Pada bulan yang sama, Yayasan Imam Ahmad bin Hanbal berharap agar Bima Arya mencabut pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberlakukan pada 2021. Yayasan merasa berhak melanjutkan pembangunan masjid, mengingat putusan hukum yang ada terkait permasalahan ini. Dialog antara pihak yayasan dan pemerintah kota masih berlangsung untuk menemukan solusi. Analisis ini menunjukkan bahwa konflik seputar pembangunan masjid tersebut berakar pada perbedaan pandangan keagamaan dan sosial di tengah masyarakat. Langkah-langkah hukum telah ditempuh, namun pendekatan musyawarah tetap diutamakan guna mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Konflik ini juga mencerminkan pentingnya peran pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan kelompok agama dengan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.

Framing Model Robert Entman dala Pemberitaan Konflik Pendirian Masjid Ahmad Bin Hanbal

Kasus terkait pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Kota Bogor mencerminkan ketegangan antara kepatuhan terhadap putusan hukum dan kekhawatiran akan potensi konflik sosial di masyarakat. Analisis framing ala Robert Entman dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana media atau aktor-aktor terkait membingkai masalah ini, memengaruhi persepsi publik, serta menentukan respon dan solusi yang ditawarkan

Berita Pertama

Serupa Tapi Tidak Bersama : Pemberitaan Media Dalam Konflik Pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal di Kota Bogor 286

Yusuf Afandi, Awis Karni, Andri Ashadi

Berita tentang keputusan Wali Kota Bogor Bima Arya untuk meninjau dan membekukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dapat dianalisis menggunakan pendekatan framing Robert Entman. Framing membantu kita memahami bagaimana berita ini disajikan untuk membentuk persepsi publik mengenai isu tersebut.

Define Problems	Dalam berita ini, masalah utama yang ditekankan adalah gejala sosial yang muncul di masyarakat terkait pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Bima Arya memutuskan untuk membekukan IMB sebagai respon terhadap masalah sosial yang didefinisikan sebagai "potensi perpecahan" di kalangan warga. Masalah lain yang diidentifikasi adalah kemungkinan adanya aspek teknis yang tidak sesuai dalam pembangunan masjid.
Diagnose Causes	Berita ini mendiagnosis dua penyebab utama yang memicu pembekuan IMB: Alasan teknis: Ada potensi bahwa dari sisi perizinan teknis pembangunan, terdapat persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Alasan sosial: Resistensi dari masyarakat terhadap pendirian masjid ini menjadi penyebab utama. Wali Kota Bogor menerima banyak keluhan dari warga yang merasa masjid ini terlalu eksklusif dan tidak inklusif.
Make Moral Judgments	Penilaian moral yang muncul dalam berita ini adalah bahwa pembekuan IMB dipandang sebagai langkah yang bijaksana dan sah untuk menjaga harmoni sosial di masyarakat. Bima Arya menegaskan bahwa masjid seharusnya bersifat terbuka dan tidak eksklusif, dan jika syarat ini tidak terpenuhi, maka wajar jika IMB dibekukan. Penilaian ini membingkai keputusan wali kota sebagai tindakan yang diperlukan untuk mencegah gejala sosial lebih lanjut.
Treatment Recommendation	Solusi yang diusulkan oleh Wali Kota Bogor adalah mediasi dan pemberian kesempatan bagi pihak Yayasan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal untuk melakukan pembelaan atau hak jawab jika ingin IMB dibuka kembali. Selain itu, masjid harus menjadi tempat ibadah yang bersifat umum dan inklusif untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jika tidak ada upaya dari pihak yayasan untuk memenuhi tuntutan keterbukaan ini, maka IMB akan dicabut secara permanen

Tabel 3. Model Analisis Framing Robert Entman dalam Berita yang berjudul Bima Arya akan Bekukan IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal

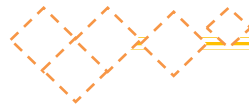
Kesimpulan Analisis Framing Berita ini menyoroti aspek sosial sebagai masalah inti yang harus diatasi, meskipun secara hukum IMB sudah dikeluarkan pada tahun 2016. Pembingkai berita menekankan bahwa keputusan Wali Kota untuk membekukan IMB adalah

tindakan yang dibenarkan untuk menjaga persatuan sosial dan mencegah perpecahan di kalangan warga. Dalam berita ini, ada upaya untuk mengarahkan perhatian publik pada pentingnya masjid sebagai tempat yang terbuka bagi semua orang, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Secara keseluruhan, framing ini mencerminkan bahwa stabilitas sosial lebih diutamakan daripada sekadar mengikuti prosedur teknis atau hukum yang telah ada, dan upaya mediasi serta dialog dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga kedamaian di tengah masyarakat.

Berita ke-2

Pendekatan framing Robert Entman memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana media membingkai isu-isu tertentu dengan memilih dan menekankan aspek tertentu dari realitas, sekaligus mengabaikan aspek lainnya. Dalam berita terkait upaya antara warga dan jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Kota Bogor, kita bisa menguraikan elemen-elemen framing yang diterapkan oleh media dalam menyajikan berita ini.

Define Problems	Masalah yang ditekankan dalam artikel ini adalah potensi konflik sosial yang timbul akibat resistensi dari sebagian warga terhadap pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal, meskipun sudah ada putusan hukum yang mendukung pembangunannya. Pemerintah Kota Bogor, melalui Forkopimda, berfokus pada pencegahan konflik sosial tersebut sebagai masalah utama yang harus diatasi.
Diagnose Causes	Artikel ini menyoroti dua penyebab utama dari masalah: Resistensi warga terhadap pembangunan masjid, baik dari penduduk sekitar maupun dari wilayah lain, yang ditampilkan sebagai penyebab utama potensi konflik. Kebijakan pemerintah kota yang memutuskan untuk tidak melaksanakan putusan hukum secara langsung, tetapi memilih untuk mengutamakan proses islah dan musyawarah guna menghindari eskalasi konflik sosial.
Make Moral Judgments	Ada penilaian moral tersirat dalam berita ini bahwa upaya yang dilakukan oleh Forkopimda dan DPRD Kota Bogor adalah langkah yang bijaksana dan perlu untuk menjaga stabilitas sosial. Wali Kota Bima Arya dan Ketua DPRD Atang Trisnanto memposisikan keputusan untuk sementara menghentikan kegiatan pembangunan masjid sebagai tindakan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Penekanan pada pentingnya mencegah konflik fisik dan sosial memperlihatkan bahwa upaya



	musyawarah dan mufakat dianggap lebih bermoral daripada tindakan langsung mengikuti keputusan hukum.
Treatment Recommendation	Solusi yang diajukan oleh Forkopimda adalah islah (rekonsiliasi) melalui musyawarah dan mufakat antara warga yang menolak pembangunan masjid dan jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, yang mendukung pembangunannya. Penetapan status konflik sosial selama 90 hari bertujuan menciptakan jeda waktu untuk mediasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sekaligus menjaga agar konflik tidak meningkat menjadi kekerasan fisik.

Tabel 4. Model Analisis Framing Robert Entman dalam Berita yang Berjudul Forkopimda Ikhtiarkan Islah Antara Warga dan Jamaah MIAH Bogor

Kesimpulan Analisis Framing Dalam berita ini, media menyoroti aspek potensi konflik sosial sebagai masalah utama, meskipun di baliknya ada isu hukum (putusan PTUN) yang mendukung pembangunan masjid. Penyebab yang ditekankan adalah resistensi warga dan kebijakan pemerintah kota yang memilih jalur musyawarah. Penilaian moral yang diberikan adalah bahwa langkah Forkopimda dalam meredam potensi konflik dianggap sebagai pendekatan yang bijak dan sah secara hukum. Solusi yang diusulkan adalah mediasi dan rekonsiliasi, bukan sekadar penegakan hukum yang kaku. Dengan pendekatan framing ala Entman, berita ini memberikan pandangan bahwa kepentingan sosial (perdamaian dan stabilitas) dianggap lebih penting daripada kepatuhan segera terhadap putusan hukum, dan ini mengarahkan persepsi publik pada solusi islah sebagai pilihan terbaik untuk menghindari eskalasi konflik.

Berita ke-3

Kesimpulan Analisis Framing dari artikel ini menggambarkan konflik antara dua perspektif utama: legalitas formal dan dinamika sosial. Dari sisi yayasan, mereka memandang bahwa putusan hukum harus diutamakan, dan penundaan dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai hukum. Sementara itu, Pemkot Bogor lebih memprioritaskan stabilitas sosial, meskipun harus menunda pelaksanaan keputusan pengadilan. Dalam konteks komunikasi publik, framing ini memperlihatkan bagaimana isu hukum dapat ditantang oleh realitas sosial yang kompleks, di

mana hukum dan aturan formal terkadang berhadapan dengan tantangan dinamika sosial di lapangan.

Define Problems	Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini adalah penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memenangkan Yayasan Pendidikan Islam Ahmad bin Hambal dalam pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Wali Kota Bogor, Bima Arya, disebut belum menjalankan keputusan ini karena kekhawatiran akan potensi konflik sosial di masyarakat akibat resistensi warga sekitar
Diagnose Causes	Dalam framing artikel, ada dua penyebab utama yang diidentifikasi: Pihak Pemkot Bogor (terutama Wali Kota Bima Arya) digambarkan sebagai pihak yang bertanggung jawab karena menunda pelaksanaan putusan PTUN. Di sisi lain, resistensi sosial dari warga juga diidentifikasi sebagai alasan mengapa pembangunan masjid belum dapat dilanjutkan, meskipun secara hukum sudah ada putusan yang inkrah
Make Moral Judgments	Penilaian moral yang muncul dari pernyataan kuasa hukum Yayasan adalah bahwa Pemkot Bogor, terutama Wali Kota, tidak mematuhi putusan hukum yang telah inkrah. Ini digambarkan sebagai tindakan yang salah secara hukum dan dianggap tanpa dasar hukum yang kuat, terutama karena tidak ada perubahan siteplan yang diajukan oleh yayasan. Di sisi lain, Pemkot memandang potensi konflik sosial sebagai alasan moral untuk menunda pembangunan demi menjaga stabilitas sosial
Treatment Recomendation	Solusi yang disarankan oleh kedua pihak tampak berbeda: Yayasan mendesak agar Wali Kota segera melaksanakan putusan PTUN dan memberikan izin pendirian masjid, tanpa menunda lagi. Pemkot Bogor, melalui Forkopimda, menyarankan pendekatan musyawarah dan mufakat antara warga dan pihak masjid untuk menghindari konflik sosial, serta mempertimbangkan dinamika lapangan sebelum melanjutkan pembangunan

Tabel 3. Model Analisis Framing Robert Entman dalam Yayasan Ahmad bin Hambal Tunggu Bima Arya Cabut Pembekuan IMB

Hasil penelitian menggunakan pendekatan analisis framing Robert Entman dalam tiga berita terkait pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Bogor menunjukkan bahwa setiap berita membingkai masalah ini dengan cara yang berbeda, meskipun fokus utama tetap pada ketegangan antara kepatuhan terhadap putusan hukum dan potensi konflik sosial. Pada berita pertama, masalah didefinisikan sebagai potensi perpecahan sosial, dengan Wali Kota

Bogor membekukan IMB untuk menjaga harmoni. Pada berita kedua, fokus diletakkan pada resistensi warga dan kebijakan islah, di mana langkah-langkah mediasi dianggap lebih bermoral daripada penegakan hukum langsung. Sementara pada berita ketiga, ketegangan antara legalitas formal dan stabilitas sosial lebih ditekankan, dengan yayasan mendesak pelaksanaan putusan hukum, sementara pemerintah memilih menunda karena mempertimbangkan potensi konflik di lapangan. Kesimpulannya, framing ketiga berita ini menyoroti prioritas stabilitas sosial dibandingkan dengan penegakan hukum formal dalam situasi yang kompleks

Konteks pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Kota Bogor, hasil penelitian ini menggunakan pendekatan framing ala Robert Entman untuk menyoroti bagaimana media atau aktor-aktor terkait membingkai isu ini guna memengaruhi persepsi publik, serta menawarkan respon dan solusi. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dinamika yang terlibat dalam permasalahan tersebut, khususnya terkait ketegangan antara penegakan hukum dan kekhawatiran akan potensi konflik sosial. Menurut Robert Entman (1993), framing melibatkan pemilihan aspek-aspek tertentu dari realitas dan penonjolan aspek-aspek tersebut untuk mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebabnya, membuat penilaian moral, dan merekomendasikan solusi. Framing dapat membentuk cara masyarakat memahami suatu permasalahan, baik dengan memperbesar atau mengabaikan aspek-aspek tertentu.

Framing digunakan secara jelas untuk menekankan berbagai aspek dari pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, dari isu legalitas hingga stabilitas sosial, serta bagaimana berbagai aktor seperti pemerintah dan masyarakat menanggapi situasi ini pada tiga berita tentang konflik pendirian rumah ibadah ini. Pada berita pertama, masalah yang ditekankan adalah gejolak sosial yang ditimbulkan dari resistensi sebagian masyarakat terhadap pendirian masjid, meskipun izin hukum telah diberikan. Pemerintah Kota Bogor menggunakan framing ini untuk membenarkan pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alasan menjaga harmoni sosial. Menurut Entman, ini adalah contoh dari bagaimana framing dapat membentuk persepsi publik dengan lebih menonjolkan dimensi sosial daripada aspek legalitas.

Berita kedua dan ketiga juga menyoroiti bagaimana potensi konflik sosial lebih diprioritaskan daripada penegakan hukum secara langsung. Pendekatan mediasi dan musyawarah diutamakan untuk menghindari eskalasi konflik, meskipun hal ini bertentangan dengan putusan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam konteks teori framing, ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih untuk membingkai masalah dengan fokus pada stabilitas sosial, yang dianggap lebih penting daripada mengikuti prosedur hukum yang ada secara kaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing yang dilakukan oleh media dan aktor-aktor terkait membentuk persepsi publik bahwa stabilitas sosial lebih diutamakan daripada penegakan hukum formal. Ini dapat dilihat dari tiga berita yang dianalisis, di mana pemerintah berulang kali menyatakan bahwa potensi konflik sosial menjadi alasan utama pembekuan IMB dan penundaan pelaksanaan putusan hukum. Pada berita pertama, resistensi masyarakat terhadap pembangunan masjid ditingkai sebagai ancaman terhadap harmoni sosial. Walikota Bogor Bima Arya, dalam hal ini, dilihat sebagai aktor yang bijaksana karena memilih untuk membekukan IMB demi menjaga persatuan masyarakat. Di sini, framing sosial lebih dominan dibandingkan dengan aspek teknis perizinan. Berita kedua dan ketiga juga menunjukkan framing serupa, di mana media dan aktor terkait menekankan pentingnya mediasi untuk meredakan konflik sosial. Dengan demikian, meskipun ada putusan PTUN yang mendukung pembangunan masjid, pemerintah Kota Bogor memilih pendekatan yang lebih berfokus pada proses musyawarah dan mufakat untuk memastikan bahwa tidak ada eskalasi konflik yang terjadi. Dalam perspektif framing, ini adalah cara untuk mengarahkan perhatian publik pada pentingnya stabilitas sosial sebagai prioritas utama.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam memahami bagaimana framing oleh media dan aktor-aktor politik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu kontroversial yang melibatkan aspek hukum dan sosial. Kasus Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Kota Bogor mencerminkan bagaimana konflik antara penegakan hukum dan kekhawatiran akan potensi konflik sosial dapat dipresentasikan oleh media, yang pada akhirnya membentuk opini publik dan memengaruhi tindakan pemerintah. Framing yang dilakukan dalam kasus ini

menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk narasi yang dapat membenarkan tindakan atau kebijakan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian komunikasi politik dan media, terutama dalam konteks isu-isu keagamaan dan sosial di Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dalam penerapan kebijakan hukum. Dalam kasus ini, meskipun secara hukum sudah ada putusan yang inkrah terkait pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, realitas sosial di lapangan menuntut adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan dialogis untuk menjaga kedamaian dan persatuan masyarakat. Hal ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pembuat kebijakan dalam menangani kasus serupa di masa depan.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini hanya mengandalkan tiga berita dari sumber media yang terbatas, sehingga tidak dapat menggambarkan seluruh spektrum pandangan yang mungkin ada di masyarakat. Penelitian lebih lanjut yang melibatkan analisis dari berbagai sumber media yang lebih beragam, termasuk media sosial, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai framing isu ini. Kedua, analisis framing dalam penelitian ini terbatas pada empat elemen yang ditetapkan oleh Entman, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgments, dan treatment recommendation. Meskipun keempat elemen ini sangat membantu dalam memahami bagaimana isu ini dibingkai, penelitian ini belum menyelidiki secara mendalam bagaimana framing ini diterima dan dipahami oleh audiens yang berbeda.

Studi selanjutnya dapat mengkaji bagaimana publik merespons framing yang diberikan oleh media, dan apakah ada perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Terakhir, penelitian ini berfokus pada aspek framing yang dilakukan oleh media dan aktor politik, namun belum menjelaskan secara rinci tentang peran organisasi masyarakat dan komunitas agama dalam membentuk narasi terkait isu ini. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana kelompok-kelompok tersebut berperan dalam membingkai dan memengaruhi persepsi *public*.

SIMPULAN

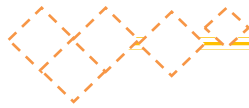
Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa stabilitas sosial diprioritaskan dalam wacana publik, dengan media dan aktor politik membingkai resistensi warga sebagai alasan sah untuk menunda pelaksanaan putusan hukum. Dalam konteks ini, framing bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari aspek legalitas formal ke aspek sosial yang dianggap lebih mendesak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa langkah mediasi dan musyawarah dipandang sebagai solusi terbaik untuk meredakan ketegangan, dan framing ini membentuk persepsi publik bahwa dialog lebih penting daripada penegakan hukum yang kaku. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan tiga berita sebagai sumber data, yang mungkin belum mencerminkan keseluruhan perspektif media atau pandangan publik yang lebih luas. Kedua, analisis ini terbatas pada elemen-elemen framing yang diusulkan oleh Entman, tanpa mengeksplorasi bagaimana framing ini diterima atau dipahami oleh audiens yang berbeda, yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti memperluas sumber data dengan melibatkan berbagai media, termasuk media sosial, untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengkaji bagaimana audiens atau kelompok masyarakat tertentu merespons framing yang disajikan dalam media, serta bagaimana peran organisasi masyarakat dan komunitas agama dalam membingkai narasi isu ini. Dengan memperluas cakupan analisis, penelitian di masa mendatang dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam memahami dinamika framing dan dampaknya terhadap opini publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtuby, S. (2016). Religious Violence and Conciliation in Indonesia Christians and Muslims in the Moluccas. In *Religious Violence and Conciliation in Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315659183>
- Detik.com, T. (2022). *Selain Jonggol, UAS Pernah Ditolak Ceramah di 6 Tempat Ini. Serupa Tapi Tidak Bersama : Pemberitaan Media Dalam Konflik Pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal di Kota Bogor* 294

- Detik.Comik.Com. <https://hot.detik.com/celeb/d-6131857/selain-jonggol-uas-pernah-ditolak-ceramah-di-6-tempat-ini>
- Esti Widiyana. (2024). *Pengajian Ustaz Riza Basalamah di Surabaya Kembali Ditolak Ansor*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7221886/pengajian-ustaz-riza-basalamah-di-surabaya-kembali-ditolak-ansor>
- Hanumbhawono, W., Maarif, S., Swastanto, Y., & Madjid, M. A. (2024). Potential For Religious Exploitation of Conflict in Indonesia. *International Journal of Religion*, 5(10), 5357–5371. <https://doi.org/10.61707/6hfhjv52>
- Harahap, S. (2018). Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>
- Indonesia, C. (2022). *Warga Bogor Tolak Pembangunan Masjid Imam Hanbal karena Aliran Wahabi*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220727162950-20-826962/warga-bogor-tolak-pembangunan-masjid-imam-hanbal-karena-aliran-wahabi>
- Jazai, Z. (2024). *Warga Kelurahan Kelutan Tolak Pembangunan Musala, Ini Penyebabnya*. Radartulungagung.Jawapos.Com. <https://radartulungagung.jawapos.com/trenggalek/764651515/warga-kelurahan-kelutan-tolak-pembangunan-musala-ini-penyebabnya>
- Khaidar, N., & Nugraha, M. A. (2022). Protection of Indigenous Peoples (Local Beliefs) in the Context of Human Rights in Indonesia. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 1(2), 101–130. <https://doi.org/10.15294/ciils.v1i2.58319>
- Komang Ariyanto. (2023). Social Conflict Among Religious Groups in the Perspective of Sociology of Religion. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 3(2), 213–226. <https://doi.org/10.33830/humaya.v3i2.6625>
- Muhammadiyah. (2022). *Warga Tuban Tolak Pembangunan Sekolah Muhammadiyah, LBHMu Langsung Turun Ke Lokasi*. Itb-Ad.Ac.Id. <https://www.itb-ad.ac.id/2022/01/07/warga-tuban-tolak-pembangunan-sekolah-muhammadiyah-lbhmu-langsung-turun-ke-lokasi/>
- Mukhtar, N., & Triana, N. (2023). Qur'anic Perspective on Social Religious Conflict Resolution Based on Culture of Togetherness and Rembugan in Indonesia. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(2), 523. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i2.424>

- Noorbani, M. A. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Respons Dini Konflik Keagamaan di Kota Depok dan Kota Bogor. *Dialog*, 46(1), 100–113.
<https://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.685>
- Panggabean, S. R., & Ali-Fauzi, I. (2015). *Policing Religious Conflicts in Indonesia*. Paramadina Foundation.
<https://www.academia.edu/download/42393813/PanggabeanEtal-2015-PolicingReligiousConflict.pdf>
- Rahmat Wibisono. (2017). *Felix Siauw Bersyukur Ditolak di Semarang*. Solopos.
<https://jateng.solopos.com/felix-siauw-bersyukur-ditolak-di-semarang-831726>
- Rasidin, M., Ramdhani, I., Ilahi, R. P., Busni, D., Witro, D., & Alghani, R. (2023). The Dimension of Religion in Political Conflict and Violence: An Experience In Indonesia. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 7(1), 1.
<https://doi.org/10.30983/it.v7i1.6146>
- Regus, M. (2020). Interreligious Conflicts in Post-Authoritarian Indonesia: Assumptions, Causes, and Implications. *Jurnal Politik*, 5(2), 199. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.267>
- Republika. (2024). *Jejak Republika.co.id*. Republika.Co.Id.
<https://www.republika.co.id/page/anniversary>
- Ridho, A., Rahmat, S., Masri, M. S. H., & Warsah, I. (2023). Synergizing stakeholders' communication for religious harmony in Indonesia. *Islamic Communication Journal*, 8(1), 41–64. <https://doi.org/10.21580/icj.2023.8.1.13626>
- Rinanda, H. M. (2023). *Duduk Perkara Ustaz Hanan Attaki Ditolak Ceramah di 7 Daerah Jatim*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6575759/duduk-perkara-ustaz-hanan-attaki-ditolak-ceramah-di-7-daerah-jatim>
- Rusmulyadi, Dida, S., Hafiar, H., & Soemirat, S. (2021). Information Mapping of Religious Conflict Research in Indonesia: Bibliometric Analysis. *Library Philosophy and Practice*, 2021, 1–12.
- Setiawan, A. M., Sananta, R. D. A., & Nurlaeli, F. (2023). Religious Tolerance in Indonesia: an Increasingly Large Space. *Socio Religia*, 4(1), 1–16.
- Sholeh, B. (2008). Conflict, Jihad, and Religious Identity in Maluku, Eastern Indonesia. *Al-Serupa Tapi Tidak Bersama : Pemberitaan Media Dalam Konflik Pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal di Kota Bogor* 296



Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 46(1), 71–99.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2008.461.71-99>

TVOne, T. (2023). *3 Momen Ustaz Khalid Basalamah Ditolak Ceramahnya oleh Banser hingga GP Ansor, mulai dari Sidoarjo hingga Masjid Al Jabbar*. Tvonenews.Com.
<https://www.google.com/amp/s/www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/107876-3-momen-ustaz-khalid-basalamah-ditolak-ceramahnya-oleh-banser-hingga-gp-ansor-mulai-dari-sidoarjo-hingga-masjid-al-jabbar>

Utama, F. R. (2024). *Gerakan Masyarakat Pemersatu Umat Kota Bogor Demo Tolak Pembangunan MIAH, Harapkan Ini*. Jawapos.
<https://radarbogor.jawapos.com/bogor/2475054660/gerakan-masyarakat-pemersatu-umat-kota-bogor-demo-tolak-pembangunan-miah-harapkan-ini>

Wijaksono, A. (2023). Ethnic and Religious Tolerance in Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 8(2), 316–325. <https://doi.org/10.20473/jde.v8i2.46417>